

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH TAHUN 2019



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan aplikasi konsep akuntabilitas dalam wujud kewajiban setiap pemimpin instansi pemerintah mempertanggung-jawabkan kinerjanya pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan kepada atasan langsung yang bersangkutan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna, bertanggung jawab dan bebas KKN dapat dicapai dengan menerapkan suatu sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata. Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 keputusan kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99, dan ditegaskan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan konsep akuntabilitas sebagai salah satu indikator kinerja birokrasi publik.

Penyusunan LAKIN ini melibatkan berbagai pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu diucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan. Pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah merupakan siklus yang terus bergerak dan selalu mengikuti perubahan yang ada dalam organisasi, maka diperlukan saran dan kritikan guna penyempurnaan laporan LAKIN ini pada masa yang akan datang.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance*.

Banda Aceh, Januari 2020
Kepala BPTP Aceh

A circular official stamp of the Ministry of Agriculture and Forestry of Aceh, Banda Aceh. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT ACEH' and 'BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Ir. M. Ferizal, M.Sc
NIP. 19650219 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja (Satker) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai gambaran aktual dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Aceh berpegang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006, dimana tugas dan fungsi BPTP Aceh adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sedangkan Program yang dilaksanakan adalah Penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra BPTP Aceh tahun 2015-2019, pada tahun 2019 BPTP Aceh mengimplementasikan program utama Badan Litbang Pertanian yaitu "Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan" melalui Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2019 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **111,36 persen**. Rata-rata nilai capaian diatas 100 persen sehingga dikategorikan **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPTP Aceh telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, BPTP Aceh telah melakukan revisi anggaran tiga kali selama tahun 2019. DIPA Pagu yang awalnya sebesar Rp.19.360.130.000,- setelah revisi keenam yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp.19.822.561.000,-. Dalam perjalanannya mengalami revisi yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: tambahan komponen kegiatan, perubahan program bekerja dan kenaikan tunjangan kinerja, tambahan komponen kegiatan dan alokasi anggaran pengadaan, perubahan target PNPB, Revisi halaman DIPA, dan Hibah. Realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan data PMK 249/2011 dan E Monev Bappenas sebesar Rp.18.811.629.906,- (**94,90 persen**).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2019 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan pengkajian dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019 masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BPTP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya kualitas SDM terutama pada kualifikasi dan bidang keahlian. Selain itu, perimbangan komposisi peneliti dengan penyuluh belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPTP Aceh berkaitan dengan respon pemerintah daerah dalam membantu dan mendukung teknologi yang didesiminasikan di daerah, selain itu terbatasnya sumber pendanaan untuk memperluas jejaring kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi antar instansi mulai dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) hingga instansi terkait sehingga perwujudan diseminasi *multi channel* belum maksimal di lapangan.

Kata Kunci: LAKIN, Renstra, Capaian Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran	5
2.4. Kegiatan	7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja	11
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun TA. 2019 dengan Target Renstra 2015-2019	17
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	20
3.2. Akuntabilitas Keuangan	20
3.2.1. Realisasi Keuangan	21
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	22
3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri	23
IV. PENUTUP	24
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	24
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	25
V. LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HAL
1	Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi BPTP Aceh Tahun 2019	8
2	Perjanjian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019	9
3	Revisi Anggaran BPTP Aceh Tahun 2019	10
4	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2019	10
5	Pengukuran Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019	12
6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	13
7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan	13
8	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan Kinerja	15
9	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kinerja	16
10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	17
11	Capaian Kinerja BPTP Aceh dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2015-2019	19
12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2019	20
13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPTP Aceh Tahun 2019	22
14	Realisasi PNBK BPTP Aceh Tahun 2019	23
15	Hibah Langsung Luar Negeri BPTP Aceh Tahun 2019	23

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HAL
1	Struktur Organisasi BPTP Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006	26
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	27
3	Dokumentasi Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2019	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2019 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Aceh tahun 2019 merupakan LAKIN tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. LAKIN BPTP Aceh yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, PMK 29 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL, Permentan No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BB Pengkajian menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu revidi atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja, (2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya serta (5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan.

Nilai dari evaluasi LAKIN adalah AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, A (memuaskan) skor 80-90, BB (sangat baik) skor 70-80, B (baik) skor 60 – 70), CC

(memadai) skor 50–60, C (kurang) skor >30–50, dan nilai D (sangat kurang) skor 0–30.

B. Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh merupakan salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 350/kpts/ot.210.6/2001 tanggal 14 Juni 2001. Struktur organisasi dan tata kerja BPTP Aceh dengan penetapan jabatan struktural. Berdasarkan surat keputusan tersebut BPTP Aceh memiliki tiga kebun percobaan (KP), yaitu KP Lampineung, KP Paya Gajah dan KP Gayo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, BPTP Aceh adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) di Bogor. BPTP Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dan penyebarluasan hasil penelitian/pengkajian ke pengguna (*end user*) terutama petani. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, maka BPTP Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraikan di atas, BPTP Aceh juga mendapatkan mandat sebagai Sekretariat Pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah (UAPPA-BW) yang

mengkoordinir pelaporan penggunaan anggaran/barang lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Aceh.

Selain berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, BPTP Aceh juga mendapatkan mandat untuk melaksanakan penugasan yang langsung dari Menteri Pertanian, berupa kegiatan on-top mendukung pencapaian kedaulatan pangan bangsa. Penugasan on-top tersebut mencakup kegiatan Upaya Khusus (Pajale), Dukungan Kegiatan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB), Pengembangan Pola Tanam dan Peningkatan IP, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan yang secara periodik harus melakukan pelaporan kepada BBP2TP Bogor, sebagai atasan langsung BPTP Aceh.

Struktur Organisasi BPTP Aceh (Lampiran 1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai: Ir. M. Ferizal, M.Sc.
- b. Kasubbag Tata Usaha: Nurlaili, S.H., M.Si
- c. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian: M. Ramlan, S.P
- d. Koordinator Program dan Evaluasi: Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian dan desiminasi oleh BPTP Aceh tahun 2019 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Litbang Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Balitbangtan 2014-2019 (edisi revisi).

2.1. Visi

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan

2.2. Misi

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.

2.3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Aceh diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi teknologi pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan paket teknologi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Aceh.

Sesuai dengan mandatnya, maka tujuan kegiatan yang dilaksanakan di BPTP Aceh adalah:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

b) Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh BPTP Aceh adalah :

1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan *Advanced Technology* dan *bioscience*.
2. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis *bioscience* dan bioengineering dengan memanfaatkan *advanced technology*, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
3. Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
4. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
5. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
6. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

c) Dinamika Lingkungan Strategis Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Perubahan paradigma dan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dalam rentang waktu 2015 – 2019, akan terus berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya institusi dan stakeholder di daerah. Dengan demikian, diperlukan strategi khusus agar kiprah dan eksistensi BPTP Aceh dapat terwujud secara nyata. Strategi tersebut digambarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah dan fokus untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya. Harapannya, kegiatan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghasilkan produk-produk teknologi yang inovatif, sesuai kebutuhan pengguna dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi spesifik lokasi 2015-2019 harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pertanian Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam SIPP 2015-2045, serta arah kebijakan litbang pertanian. Berdasarkan kebijakan litbang pertanian untuk pengembangan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bio-industri, maka arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi mendukung pertanian bioindustri berbasis sumberdaya lokal, sesuai dengan **Program**

Badan Litbang Pertanian 2015-2019: Penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan.

Secara rinci program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan dinyatakan dengan sasaran strategis yaitu:

1. Tersedianya inovasi pertanian spesifik lokasi mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan
2. Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi, serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
3. Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi
4. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi
5. Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

2.4. Kegiatan

Dukungan Badan Litbang dan BBP2TP terhadap target pencapaian sukses Kementerian Pertanian ditunjukkan dalam sasaran strategis, yang diantaranya berkaitan langsung dengan Tupoksi BPTP Aceh, yakni menghasilkan inovasi teknologis pesifik lokasi, meningkatkan sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta membangun jejaring kerjasama antar daerah dan nasional. Sejak berdirinya BPTP sesuai dengan Permentan 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, tugas utama BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat gunas pesifik lokasi. Dinamika terkini yang berhubungan dengan Tupoksi BPTP adalah terbitnya Permentan No. 19 tahun 2017, tentang tata kerja BPTP adalah adanya penugasan bagi penyuluh di BPTP untuk membantu penyuluh didaerah dalam mempersiapkan materi teknis penyuluhan.

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BPTP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BPTP Aceh sebagai penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk

menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam melaksanakan kegiatannya mendukung program utama Badan Litbang 2015 yaitu Penciptaan Varietas Unggul Berdaya Saing, maka Indikator Kinerja Utama BPTP Aceh yaitu: 1). Teknologi pertanian spesifik Lokasi; 2). Teknologi yang didiseminasikan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Litbang Pertanian dan BBP2TP, BPTP Aceh melaksanakan kegiatan pengkajian spesifik lokasi dilakukan di 23 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh serta rekomendasi kebijakan spesifik lokasi merupakan implemetasi hasil koordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan teknologi di daerah. Adapun kegiatan diseminasi meliputi kegiatan *top down* yang mendukung kinerja Kementerian Pertanian seperti program pendampingan TTP dan Tagrimart serta kegiatan diseminasi *in-house* seperti visitor plot serta kegiatan diseminasi dengan memanfaatkan kebun percobaan.

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2019, BPTP Aceh mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPTP Aceh tahun 2019. Kegiatan utama BPTP Aceh pada tahun 2019 yang mencakup kegiatan pengkajian dan diseminasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi BPTP Aceh Tahun 2019

No	Judul Kegiatan Tahun 2019
1	Teknologi Spesifik Lokasi
2	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna
3	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
4	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi
5	Taman Sains Pertanian (TSP)
6	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan
7	Benih Padi
8	Benih Jagung
9	Benih Kedelai
10	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
11	Koordinasi Manajemen Pengkajian
12	Jejaring/Kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk
13	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
14	Layanan Dukungan Manajemen Satker
15	Layanan Perkantoran

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penyusunan Perjanjian Kinerja kegiatan penelitian diselaraskan dengan sasaran Renstra BPTP Aceh 2015 – 2019. BPTP Aceh setiap tahun telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2019 (Lampiran 2) yang berisi: 1) Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan 3) Target yang akan dihasilkan.

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BPTP Aceh disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPTP Aceh untuk tahun 2018 melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPTP Aceh. Untuk mengukur kinerja kegiatan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTP Aceh, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	11 Paket Teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh	3 Nilai IKM

Pada Tahun 2019 BPTP Aceh untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, jumlah alokasi anggaran pada DIPA BPTP Aceh sampai dengan bulan Desember telah mengalami tiga kali revisi, yang semula sebesar Rp. 19.360.130.000,- setelah revisi keenam yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 19.822.561.000,- tersebut terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Rp 6.743.090.000; 2) Belanja operasional

perkantoran Rp 1.356.600.000; 3) Barang non operasional Rp 5.601.518.000 dan 4) Belanja Modal Rp 6.121.353.000. Selain dana dari DIPA, terdapat juga 1 kegiatan kerjasama penelitian dengan Universitas Syiah Kuala dan ACIAR-Australia dengan nilai sebesar Rp 34.703.000,-. Sedangkan rincian pagu anggaran yang dikelola secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Anggaran BPTP Aceh Tahun 2019

No	Bulan	Kondisi Revisi Anggaran
1	Desember 2018	Dipa Awal
2	Februari 2019	Revisi I: Penambahan Alokasi Belanja Modal
3	November 2019	Revisi II: Penyesuaian Halaman III DIPA untuk Rencana Penarikan Dana (RPD)
4	Desember 2019	Revisi III: Pemutakhiran data POK dan Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk uang (HLL) Kerjasama Luar Negeri BPTP Aceh ACIAR Australia

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, alokasi anggaran BPTP Aceh berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2019

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	%
1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	19.822.561.000	100,00
201	Teknologi Spesifik Lokasi	507.436.000	2,56
202	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	2.027.868.000	10,23
203	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	59.925.000	0,30
204	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	74.812.000	0,38
206	Taman Sains Pertanian (TSP)	6.000.000.000	30,27
209	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	162.641.000	0,82
210	Benih Padi	167.250.000	0,84
211	Benih Jagung	189.541.000	0,96
212	Benih Kedelai	353.121.000	1,78
213	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	52.900.000	0,27
216	Koordinasi Manajemen Pengkajian	50.000.000	0,25
305	Jejaring/Kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk	107.403.000	0,54
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.291.353.000	6,51
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	678.621.000	3,42
994	Layanan Perkantoran	8.099.690.000	40,86

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Pada tahun anggaran 2019, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2015-2019 yang telah direvisi, BPTP Aceh telah menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi, dan (2) Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh. Selanjutnya, kedua sasaran tersebut diukur dengan empat indikator kinerja output berupa: (1) Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), (2) Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%), (3) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, dan (4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPTP Aceh, capaian indikator kinerja kegiatan utama BPTP Aceh tahun 2019 disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BPTP Aceh tahun 2019 rata-rata melebihi 100% (111,36%) atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh**

oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (2) **berhasil** jika capaian 80-100%; (3) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (4) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	11 paket teknologi	16 paket teknologi	145,45
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100 %	100 %	100
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100
2	Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh	3 Nilai IKM	3 Nilai IKM	100
	Rata-rata				111,36

Berdasarkan Tabel 5, secara umum capaian kinerja untuk sasaran BPTP Aceh masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai di atas 100%. Indikator kinerja yang dapat mencapai target 100% adalah: Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPTP Aceh. Sedangkan indikator kinerja lainnya memiliki capaian kinerja lebih dari 100% (sangat berhasil), yaitu Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPTP Aceh tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1
Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1) jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), (2) rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, dan (3) jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Paket Teknologi	11	16	145,45
Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	%	100	100	100
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100

Berdasarkan Tabel 6, untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja sasaran. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPTP Aceh berhasil memperoleh 16 jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan dari 11 paket teknologi yang ditargetkan (145,45%), memiliki rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian yang dilakukan sebesar 100%, dan menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan dari 1 rekomendasi yang ditargetkan (100%). Capaian masing-masing indikator dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

Sampai dengan tahun 2019, telah tercapai 16 paket teknologi dari target 11 paket teknologi yang dimanfaatkan (145,45%). Capaian ini merupakan akumulasi paket teknologi yang dimanfaatkan pada tahun 2014 – 2019 (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Paket Teknologi	11	16	145,45

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat. Sedangkan teknologi yang didiseminasikan adalah hasil pengkajian yang disebarluaskan melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena BPTP Aceh merupakan unit kerja yang memiliki tugas melakukan pengkajian dan diseminasi langsung pada pengguna, maka teknologi yang didiseminasikan sekaligus merupakan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai paket teknologi spesifik lokasi yang telah dimanfaatkan oleh petani, masyarakat umum, dan pemerintah daerah, menjadi pendorong perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian.

Nilai capaian kinerja indikator ini sebesar 145,45%, disebabkan oleh banyaknya teknologi yang dimanfaatkan sebagai dampak dari kegiatan diseminasi yang secara masif dilakukan BPTP Aceh selama ini. Hal ini terjadi mengingat diseminasi teknologi Kementerian Pertanian pada umumnya, dan teknologi Balitbangtan pada khususnya ikut mengakselerasi pemanfaatan teknologi pertanian yang sudah berada pada level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*technology readiness*) yang masuk klasifikasi siap didiseminasi.

Dukungan Badan Litbang dan BBP2TP terhadap target pencapaian sukses Kementerian Pertanian ditunjukkan dalam sasaran strategis, yang diantaranya berkaitan langsung dengan Tupoksi BPTP Aceh, yakni menghasilkan inovasi teknologis spesifik lokasi, meningkatkan sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta membangun jejaring kerjasama antar daerah dan nasional. Sejak berdirinya BPTP sesuai dengan Permentan 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, tugas utama BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat gunas spesifik lokasi. Dinamika terkini yang berhubungan dengan Tupoksi BPTP adalah terbitnya Permentan No. 19 tahun 2017, tentang tata kerja BPTP adalah adanya penugasan bagi penyuluh di BPTP untuk membantu penyuluh di daerah dalam mempersiapkan materi teknis penyuluhan.

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BPTP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BPTP Aceh sebagai

penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Tahun 2019, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh telah menetapkan 3 kegiatan yang dimanfaatkan dalam kegiatan in-house. Paket teknologi yang dimanfaatkan tersebut antara lain adalah Teknologi Budidaya Kedelai Tahan Naungan, Optimalisasi SUP Inovatif Integrasi Sapi, Sawit, Jagung, dan Indigofera dan Teknologi Largo Super di Provinsi Aceh. Indikator pertama (Jumlah teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan) dimana keseluruhan target dengan realisasi telah dicapai. Dari segi pagu dan anggaran hanya terdapat selisih sebesar Rp. 37.517,- (0,01%) tidak dapat terrealisasi selama periode kegiatan berlangsung dibandingkan capaian realisasi Rp. 507.436.000,- (99,99%).

Indikator Kinerja 2:

Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)

Indikator kinerja kedua yang ditargetkan pada tahun 2019 telah tercapai 100 persen, termasuk kategori **berhasil** (Tabel 8). Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan merupakan indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	%	100	100	100

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi paket teknologi pertanian wilayah. Di antara teknologi pertanian spesifik lokasi tersebut ada yang berpotensi untuk menjadi teknologi pertanian unggulan. Sedangkan pengkajian teknologi pertanian adalah kegiatan

pengujian kesesuaian komponen teknologi pertanian pada berbagai kondisi lahan dan agroklimat untuk menghasilkan teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi.

Indikator Kinerja 3:

Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan

Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Indikator kinerja ketiga dari sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian adalah jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Nilai capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100

Capaian target jumlah rekomendasi kebijakan sebesar 1 rekomendasi (100%) dari target 1 rekomendasi (sangat berhasil). Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang dihasilkan dari kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan. Adapun jenis rekomendasi kebijakan di lingkup BPTP Aceh adalah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian responsif dan antisipatif. Pada tahun 2019, rekomendasi kebijakan berfokus pada Optimalisasi Lahan Kering dan Lahan Tadah Hujan serta Gerakan Petani Milenial di Provinsi Aceh. Indikator kinerja kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Wilayah berupa rekomendasi kebijakan pengembangan perbenihan yang operasional secara cepat dan tepat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 59.918.500 (99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 6.500 (0,01%).

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.

Indikator Kinerja 4:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Capaian kinerja indikator dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh	Nilai IKM	3	3	100

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB No 14 tahun 2017, nilai IKM rata-rata BPTP Aceh pada tahun 2019 sebesar 82,55 berada pada interval konversi mutu pelayanan 76,61 – 88,30 atau nilai persepsi 3. Artinya mutu pelayanan kinerja berada pada kategori B atau kinerja unit pelayanan BPTP Aceh dinilai Baik. Mengacu pada target indikator kinerja, IKM atas layanan publik BB Pengkajian telah mencapai target, karena telah tercapai nilai persepsi sebesar 3 (100%), sehingga termasuk dalam kategori **Berhasil**. Ruang lingkup pengukuran kepuasan masyarakat ini meliputi Sembilan unsur yakni persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Pada tahun 2019, telah dilakukan survey kepuasan masyarakat secara online pada situs ikm.pertanian.go.id. dengan jumlah responden 82 orang. BPTP Aceh menerapkan sistem survey online pada penilaian kepuasan masyarakat pada semester 2 tahun 2019 periode Juli-Desember 2019. Hasil IKM semester I lebih tinggi dari IKM semester II tetapi masih dalam kategori baik diatas 80%. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2019. Namun demikian, BPTP Aceh telah melakukan pengukuran IKM pada tahun 2019 walaupun dengan kriteria pengukuran yang berbeda yaitu dengan mengukur 9 unsur pelayanan. Pada tahun 2018, hasil survey kepuasan BPTP Aceh mendapatkan nilai rata-rata 82,33 (mutu pelayanan baik).

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2019 dengan Target Renstra 2015 -2019

Jika membandingkan dengan target tahun 2019 yang terdapat pada Renstra Revisi tahun 2015–2019, secara umum capaian kinerja BPTP Aceh tahun 2019 mencapai target (Tabel 11). Indikator yang mencapai target sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan capaian 100% yaitu: (1) Rasio paket teknologi pertanian yang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh

dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, (2) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan (100%) serta (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPTP Aceh (100%). Sedangkan indikator yang nilai capaiannya melebihi target Renstra Revisi yaitu indikator: Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dengan capaian sebesar 145,45%, yang disebabkan karena capaian tahun 2019 dihitung berdasarkan nilai kumulatif lima tahun terakhir, mempunyai nilai yang tinggi pada tahun 2014 – 2019.

Dengan adanya penyempurnaan IKU, Renstra BPTP Aceh direvisi pada tahun 2019, sehingga untuk perbandingan nilai capaian selama tahun 2015–2019 dengan target Renstra Revisi tahun 2015–2019, hanya dapat dilakukan pada dua tahun terakhir. Untuk indikator Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) capaiannya sudah melampaui target Renstra Revisi yaitu sebesar 145,45%. Sedangkan untuk indikator Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, capaiannya sudah memenuhi target 100% dari total target Renstra Revisi.

Tabel 11. Capaian Kinerja BPTP Aceh dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Target Renstra (Edisi Revisi)					Jumlah Target 2015-2019	Capaian Tahun					Realisasi Tahun 2015-2019 dibandingkan Target 2015-2019 (%)	Realisasi Tahun 2019 dibandingkan Target Tahun 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	-	-	-	3	3	11	3	3	4	3	3	145,45	100
2	Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100
3	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	100	100

3.1.2. Keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi

Keberhasilan

Pada tahun 2019 sasaran **pertama** tersedianya teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi mencapai 145,45%. Sasaran **kedua** yaitu meningkatnya penyebarluasan (diseminasi) sebesar 100% sedangkan sasaran **ketiga** meningkatnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian mencapai 100% dan sasaran **keempat** meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian dengan rata-rata seluruh capaian sebesar 100%. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh tahun 2019 secara umum menunjukkan keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019.

Kendala

Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna, yakni peningkatan mutu SDM. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019 masih ditemui beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPTP Aceh dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan BPTP Aceh tentunya memiliki keterbatasan terutama sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia. Hal inilah yang banyak mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran. Selama tahun 2019 keberhasilan yang dicapai oleh BPTP Aceh antara lain disebabkan oleh: (1) Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu; (2) Intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggungjawab; dan (3) Sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar proposal dan pertemuan lainnya.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi pelaksanaan kegiatan BPTP Aceh adalah BPTP Aceh harus : (1) Melakukan akselerasi inovasi teknologi pertanian agar terdesiminasikan ke pengguna (*End User*); (2) Melakukan padu padan transfer pengetahuan inovasi teknologi yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh**

perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan, BPTP Aceh didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA BPTP Aceh Tahun 2019.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Anggaran BPTP Aceh dialokasikan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: DIPA-018.09.2.567392/2019, tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 19.360.130.000,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi DIPA selama tahun berjalan, dikarenakan adanya kebijakan penganggaran berupa penambahan dan penyesuaian anggaran, maka jumlah Pagu DIPA Revisi Tahun 2019 terakhir sebesar Rp. 19.822.561.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran BPTP Aceh, adapun jenis belanja (menurut DIPA tahun 2019) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja modal.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2019

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	19.822.561.000	18.811.629.906	94,90
201	Teknologi Spesifik Lokasi	507.436.000	507.398.483	99,99
202	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	2.027.868.000	2.025.605.868	99,89
203	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	59.925.000	59.918.500	99,99
204	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	74.812.000	74.059.010	98,99
206	Taman Sains Pertanian (TSP)	6.000.000.000	5.412.928.772	90,22
209	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri di Perbatasan	162.641.000	162.523.300	99,93
210	Benih Padi	167.250.000	156.287.000	93,45
211	Benih Jagung	189.541.000	183.019.100	96,56
212	Benih Kedelai	353.121.000	180.802.700	51,20
213	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	52.900.000	52.728.100	99,68
216	Koordinasi Manajemen Pengkajian	50.000.000	49.865.000	99,73
305	Jejaring/Kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk	107.403.000	107.395.879	99,99
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.291.353.000	1.243.083.600	96,26
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	678.621.000	678.196.063	99,94
994	Layanan Perkantoran	8.099.690.000	7.917.818.531	97,75

Realisasi anggaran BPTP Aceh per 31 Desember 2019 berdasarkan data PMK 249/2011 dan E-Monev Bappenas sebesar Rp. 18.811.629.906,- (94,90%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp. 1.010.931.094,- (5,10%). Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 12.

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPTP Aceh Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	(%)
1.	Pegawai	6.743.090.000	6.605.156.488	137.933.512	97,95
2.	Barang Operasional	1.356.600.000	1.312.662.043	43.937.957	96,76
3.	Barang Non Operasional	5.601.518.000	5.395.768.852	205.749.148	96,33
4.	Modal	6.121.353.000	5.498.042.523	623.310.477	89,82
	Jumlah	19.822.561.000	18.811.629.906	1.010.931.094	94,90

Dari DIPA sejumlah Rp. 18.822.561.000,- realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 18.811.629.906,- atau 94,90% dari nilai DIPA. Belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja pegawai (gaji PNS), belanja barang (kegiatan kantor) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal). Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan.

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BPTP Aceh pada tahun 2019 diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada BPTP Aceh sesuai DIPA tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 278.162.000,-. Potensi estimasi PNBP diperoleh dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Realisasi penerimaan pada akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 478.888.120,- (172,16%). Realisasi PNBP yang besar berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang (41,68%) dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (44,56%). Penggunaan PNBP juga telah

dilaksanakan sesuai dengan naskah dokumen perencanaan dan batas maksimal penggunaan PNBPN tersebut yaitu 88% dari nilai pagu estimasi penerimaan PNBPN pada tahun 2019. Secara rinci besarnya PNBPN BPTP Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi PNBPN BPTP Aceh Tahun 2019

No	Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	255.062.000	199.615.500	78,26
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	213.376.039	0,00
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	21.600.000	26.368.670	122,07
4	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.500.000	0	0,00
5	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	11.421.000	0,00
6	Pendapatan Denda I	0	28.106.817	0,00
7	Pendapatan lain-lain	0	94	0,00
	Total	278.162.000	478.888.120	172,16

3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Pada tahun 2019 BPTP Aceh juga menerima dana dari kegiatan kerjasama dengan Aciar-Australia sebesar Rp. 34.703.000,- dengan tingkat realisasi anggaran mencapai Rp. 34.703.000,- (100%). Secara rinci besarnya realisasi Hibah langsung Luar Negeri BPTP Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hibah Langsung Luar Negeri BPTP Aceh Tahun 2019

No	Jenis Hibah	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kerjasama Aciar-Australia	34.703.000	34.703.000	100,00

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh Tahun 2019 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPTP Aceh juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BPTP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi maupun bidang keahlian. Selain itu, perimbangan komposisi peneliti dengan penyuluh belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPTP Aceh berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan.

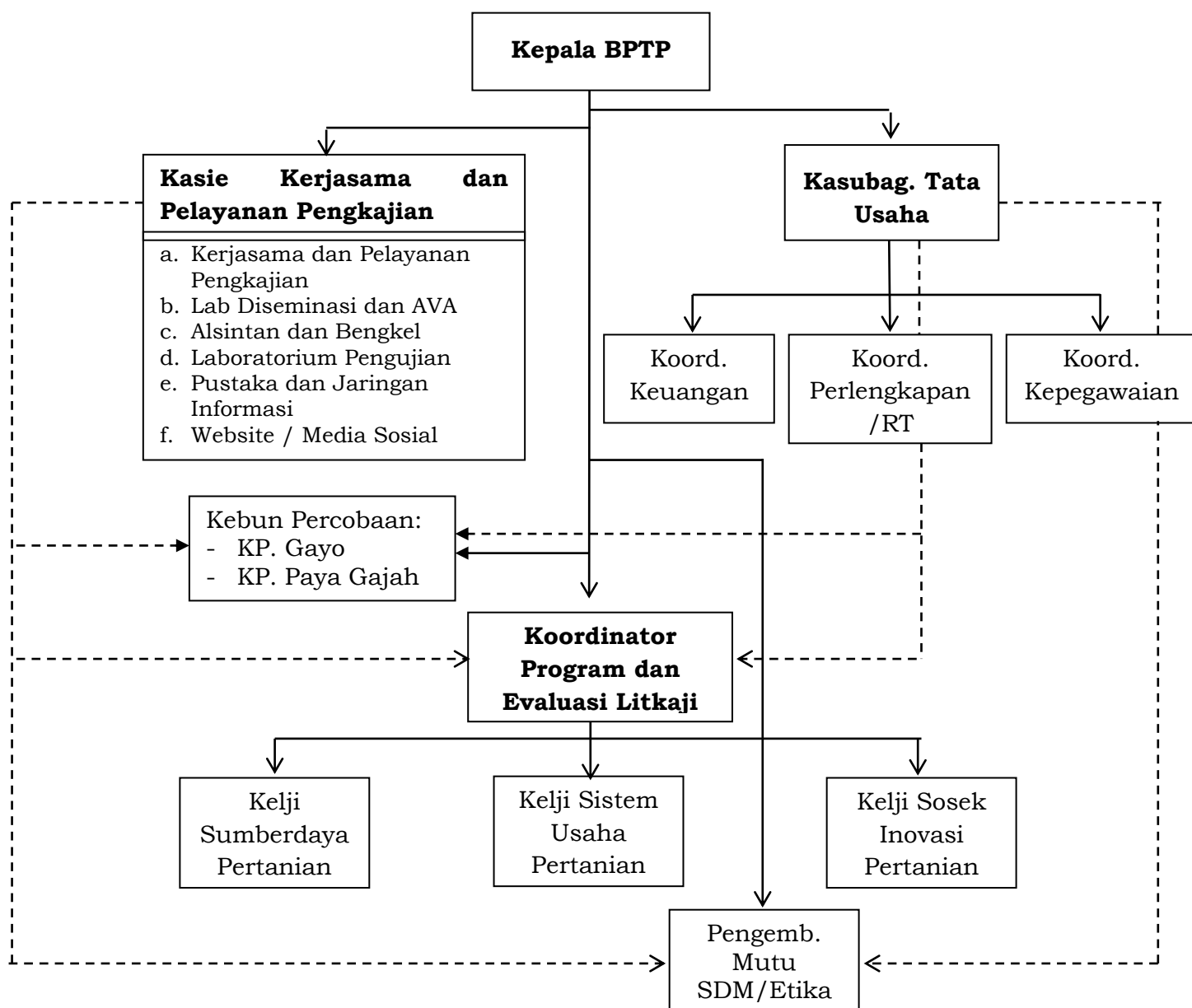
1. Indikator kinerja yang dapat mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen (berhasil) adalah rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan IKM atas layanan publik BPTP Aceh.
2. Indikator kinerja yang memperoleh capaian dengan nilai > 100 persen (Sangat Berhasil) adalah jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
3. Secara umum nilai capaian kinerja selama pelaksanaan Renstra tahun 2015–2019 menunjukkan hasil di atas 100% untuk indikator kinerja jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (145,45%). Sedangkan untuk indikator yang mencapai 100% yaitu rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan IKM atas layanan publik BPTP Aceh. Untuk indikator Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan realisasinya mencapai 100%.
4. Nilai capaian tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2019 yang terdapat pada Renstra Revisi tahun 2015 – 2019, secara umum menunjukkan terpenuhinya target yang telah ditetapkan yaitu jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Indikator kinerja rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPTP Aceh dan Pengembangan Teknologi Pertanian mencapai hasil sesuai target (100%).

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja BPTP Aceh ke depan masih diperlukan, langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:

1. Melakukan akselerasi inovasi teknologi pertanian agar terdesiminasikan ke pengguna (*End User*).
2. Melakukan padu padan transfer pengetahuan inovasi teknologi yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPTP Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2006



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Ferizal

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

M. Ferizal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH**

1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	11 paket teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh	3 Nilai IKM

KEGIATAN

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 19.822.561.000

Jakarta, 2 Desember 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pertanian Aceh

Fadjry Djufry



M. Ferizal

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2019

 <p>Temu Lapang & Panen Kajian Paket Teknologi Budidaya Kedelai Tahana Naungan Prov. Aceh Pidie N 5° 15' 56", E 96° 7' 10" 13 Jun 2019 11:24:57</p>	<p>Kegiatan In-house Temu Lapang dan Panen Kedelai Tahana Naungan di Kabupaten Pidie</p>
 <p>Tanam Perdana Kegiatan UPSUS di Indrapuri 5°25'38", 95°25'15", -17,0m, 105° 03/05/2019 17:43:58</p>	<p>Diseminasi Tanam Perdana Pendampingan Teknologi IP-300 Pada Kegiatan Pendampingan UPSUS di Kabupaten Aceh Besar</p>
 <p>FGD ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2019 29 Nov 2019 09:22:49</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan FGD kegiatan analisis kebijakan pembangunan pertanian : Optimalisasi Lahan Kering dan Lahan Tadah Hujan serta Gerakan Petani Milenial di Provinsi Aceh yang dilaksanakan di BPTP Aceh</p>